



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**UNIT KERJA** : RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DWI RUSHARYATI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 246304

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.480.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m<sup>2</sup>/207 m<sup>2</sup> di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 240 m<sup>2</sup> di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. Tanah Seluas 350 m<sup>2</sup> di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. Tanah Seluas 100 m<sup>2</sup> di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 462.000.000

1. MOBIL, ALL NEW HONDA BRIO MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HADIAH Rp. 13.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 51.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 516.429.931

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.509.429.931



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.509.429.931

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.